

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



KECAMATAN BONATUA LUNASI

KABUPATEN TOBA

TAHUN 2025-2029



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Toba yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun..
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
- b. Mewujudkan integritas, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintah.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - e. BAB V : Penutup
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Sebagai tanda pengesahan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah menandatangani dokumen Renstra Perangkat Daerah yang terkait dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 5

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan, regulasi, atau kondisi yang memerlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perubahan indikator kinerja dan target kinerja perangkat daerah;
 - b. Penyesuaian indikasi pendanaan;
 - c. Perubahan perangkat daerah penanggung jawab urusan pemerintahan; dan/atau
 - d. Perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan penyesuaian pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, tanpa mengubah substansi dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keselarasan, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/ dto

AUGUS SITORUS

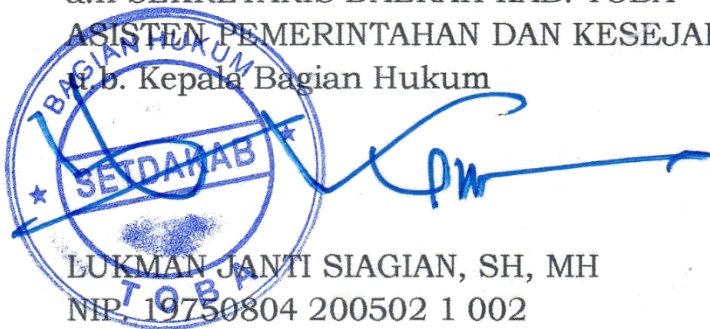
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 31

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

z.b. Kepala Bagian Hukum



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
NIP. 19750804 200502 1 002

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberkati dan memberikan karunia sehingga Pemerintah Kecamatan Bonatua Lunasi dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bonatua Lunasi untuk masa 5 (lima) tahun kedepan sebagai implementasi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Harapan kami, Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Bonatua Lunasi ini dapat membantu dan menjadi pedoman aparatur Pemerintah Kecamatan Bonatua Lunasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dicita-citakan yakni terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba.

Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya. Selain itu, dokumen ini juga memuat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Telah menjadi komitmen Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsistensi terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Semoga Kecamatan Bonatua Lunasi dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Disamping itu, kami menyadari bahwa Renstra ini belum sempurna, maka untuk kesempurnaannya pada Renstra selanjutnya, akan tercapai melalui saran, kritik yang konstruktif dari para pembaca.

Akhirnya, besar harapan kami bahwa Renstra Kecamatan Bonatua Lunasi ini benar-benar dapat menjadi prasarana kami dalam memberikan pelayanan pembangunan di Kecamatan Bonatua Lunasi menuju masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

Lumban Lobu, 19 September 2025

Camat Bonatua Lunasi



Judiman Silitonga, SE

Pembina/IVa

NIP. 196809291988031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BONATUA LUNASI.....	
2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONATUA LUNASI ..	7
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BONATUA LUNASI	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN BONATUA LUNASI	21
3.2 STRATEGI RENSTRA KECAMATAN BONATUA LUNASI	23
3.3 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN BONATUA LUNASI	23
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 DAFTAR PROGRAM,.....	25
4.2 DAFTAR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	28
4.3 DAFTAR KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	36
4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	37
BAB V PENUTUP	38
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan renja Kerja pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan Rencana-rencana Pembangunan dalam Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah.



Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Toba, Kecamatan Bonatua Lunasi sebagai unit Kerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memerlukan dokumen perencanaan yang konsisten dan akuntabel untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Perangkat Daerah yang handal dengan didukung oleh sarana dan prasarana aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih periode tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis Kecamatan Bonatua Lunasi Tahun 2025 - 2029 Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Kecamatan Bonatua Lunasi dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk tujuan, sasaran, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan (2025-2029) dan menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Toba.

Dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi dan misi dan program Kepala Daerah yang penyusunanya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan



kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Rencana Strategis Kecamatan Bonatua Lunasi Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis Kecamatan Bonatua Lunasi Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kecamatan Bonatua Lunasi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;
2. Rencana Strategis Kecamatan Bonatua Lunasi Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bonatua Lunasi yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Kecamatan Bonatua Lunasi Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Bonatua Lunasi, baik evaluasi Rencana Strategis maupun evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Bonatua Lunasi. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bonatua Lunasi.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kecamatan Bonatua Lunasi tahun 2025- 2029 adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang



Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana

- 10 telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 adalah Memberikan arahan yang sistematis dalam pemanfaatan sumber daya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Bonatua Lunasi.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1) Terjabarkannya arah dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah ke dalam perencanaan jangka menengah Kecamatan
- 2) Tersedianya arahan yang jelas dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bonatua Lunasi Tahun 2025- 2029 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan



BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BONATUA LUNASI

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONATUA LUNASI

- 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Bonatua Lunasi
- 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Bonatua Lunasi
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonatua Lunasi
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan
- 2.1.5 Keuangan dan Neraca Perangkat Daerah
- 2.1.6 Aset Perangkat Daerah

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BONATUA LUNASI

- 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bonatua Lunasi
- 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bonatua Lunasi
- 3.2 Strategi Renstra Kecamatan Bonatua Lunasi
- 3.3 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bonatua Lunasi

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif
- 4.4 Uraian Sub kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Bonatua Lunasi Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BONATUA LUNASI

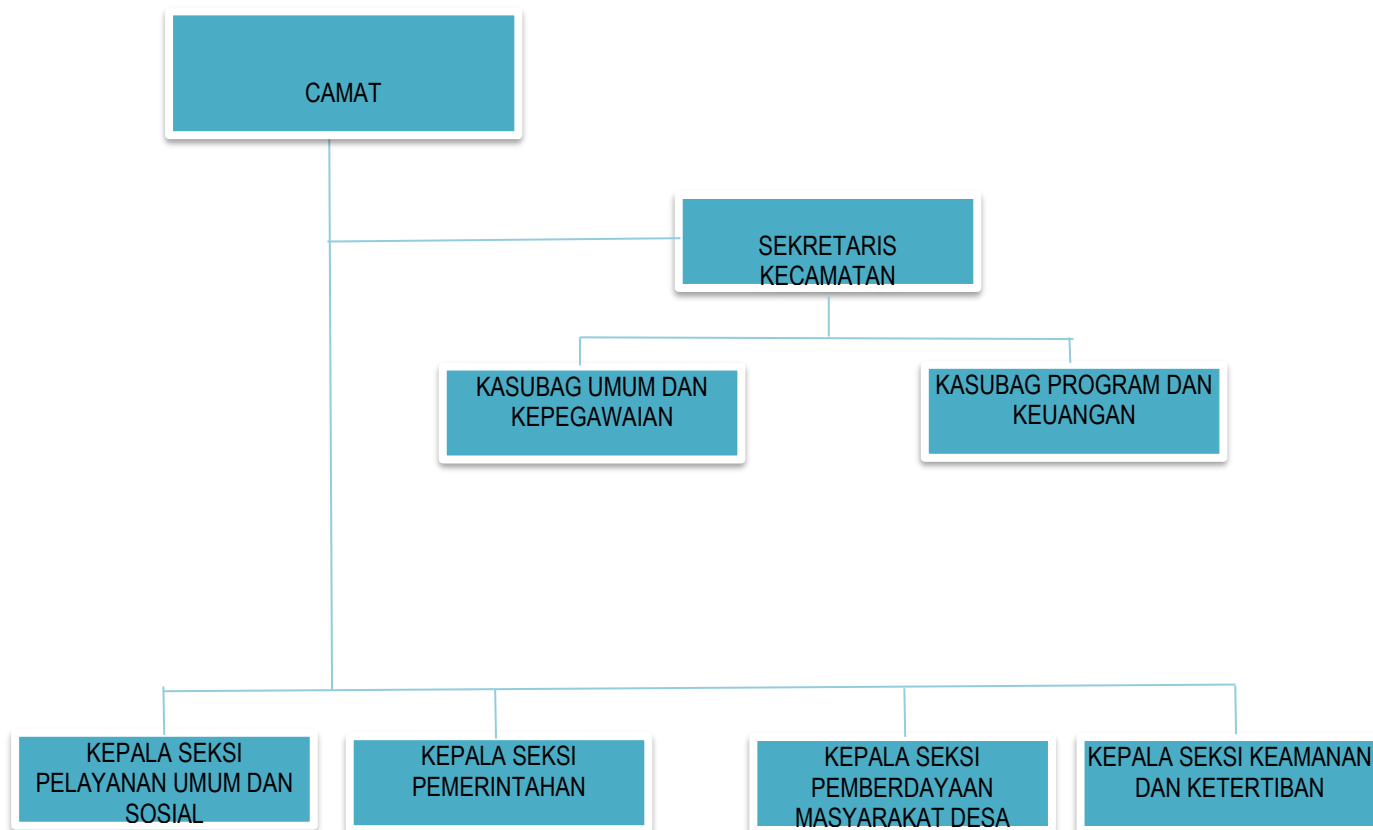
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Bonatua Lunasi

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Bonatua Lunasi

Pemerintah Kecamatan terdiri dari unsur pimpinan yaitu Camat, unsur Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan serta Sub Bagian Program dan Keuangan, ditambah 4 (empat) Seksi yang masing-masing dipimpin oleh kepala Seksi yaitu: Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Bonatua Lunasi



Tugas Pokok dan Fungsi Camat, sebagai berikut :

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan.
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan

- perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi Vertikal terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standarpelayanan minimal di wilayahnya;

3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- i) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdaya Manusia (Pegawai) Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan Bonatua Lunasi tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Pegawai Kecamatan Bonatua Lunasi berjumlah 16 orang, terdiri dari 14 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK) serta Memiliki 8 Jabatan Strutural, 7 diantaranya telah memiliki Pejabat yang mumpuni, sehingga Kecamatan Bonatua Lunasi kekurangan 1 Pejabat Struktural Eselon IVa, yaitu Kepaka Seksi Pemerintahan, yang mengakibatkan kurang optimalnya Pelayanan di Kecamatan Bonatua Lunasi.

Sumber daya Manusia di Kecamatan Bonatua Lunasi berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.2
SDM Kantor Kecamatan Bonatua Lunasi Berdasarkan
Pangkat/Golongan Ruang dan Pendidikan di Perangkat Daerah
Tahun 2025

No.	Uraian	Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	
1.	Pembina Tk. I (IV/b)					0
2.	Pembina (IV/a)			2		2
3.	Penata Tk. I (III/d)			1		1
3.	Penata (III/c)			1		1
4.	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	1	4		6
5.	Penata Muda (III/a)	1				1
6.	Pengatur (II/c)	2	1			3
JUMLAH		4	2	8	0	14

Tabel 2.3
SDM Kantor Kecamatan Bonatua Lunasi Berdasarkan Jabatan dan
Jumlah Pegawai Tahun 2025

No.	Uraian Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	2
2.	Eselon IV	5
3.	Staf	7
4.	Non PNS	2
JUMLAH		16

Tabel 2.4
SDM Kantor Kecamatan Bonatua Lunasi
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	8
2.	Perempuan	8
JUMLAH		16

Tabel 2.5
SDM Kantor Kecamatan Bonatua Lunasi yang telah mengikuti
Diklat Penjenjangan Diklat Pim III dan IV

No.	Diklat Pim	Jumlah
1.	Pim III	0
2.	Pim IV	0
	JUMLAH	0

Kecamatan Bonatua Lunasi mempunyai 16 orang Pegawai pada awal Januari 2025. Dengan Rincian sebanyak 7 orang Pejabat Struktural, dan 7 orang staf/pelaksana serta 2 orang tenaga harian kontrak, dan 4 orang Sekdes ASN yang berpendidikan SLTA yang berada dibawah koordinasi Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonatua Lunasi

Capaian Kinerja Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Tahun 2020-2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Bonatua Lunasi Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini



Tabel 2.6
Tujuan, Sasaran dan Indikator Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Indikator
Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di kecamatan	Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di kecamatan	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan kecamatan
		Persentase layanan administrasi yang tertangani
		Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik
		Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
		Persentase layanan administasi pemerintahan umum
		Persentase desa yang meleksanakan integrasi, sinergi dan terobosan dalam pemerintahan desa

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Indikator Tujuan dan Sasaran

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target					Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan di kecamatan	x	x	86.96	88.53	90.11	x	x	86.96	88.53	90.11
Persentase kegiatan pemeliharaan sarana dan fasilitas publik	x	x	87.5	88.13	88.75	x	x	85,7	85,7	85,7
Persentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik (2020 & 2021)	100	100	x	x	x	100	100	x	x	x
Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	x	x	77.33	81	84.67	x	x	77.33	81	84.67
Persentase partisipasi perempuan di Desa dalam kegiatan TP PKK Kecamatan (2020 & 2021)	100	100	x	x	x	100	100	x	x	x
Persentase layanan administrasi pemerintahan umum	x	x	100	100	100	x	x	100	100	100
Fasilitasi Forkopimca (2020 & 2021)	100	100	x	x	x	100	100	x	x	x
Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	x	x	83	85	87	x	x	83	85	87
Melaksanakan integritas, Sinergi dan terobosan dalam pemerintahan desa	x	x	100	100	100	x	x	100	100	100
Cakupan layanan administrasi yang tertangani (2020 & 2021)	100	100	x	x	x	100	100	x	x	x
Persentase layanan administrasi yang tertangani	x	x	88	89	89	x	x	88	89	89

Realisasi atas Capaian tersebut adalah target Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan Bonatua Lunasi sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Bonatua Lunasi :

- a) Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pemberdayaan masyarakat; menyangkut pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan
- b) Menjalin kerja sama dan koordinasi dalam menjamin keamanan dan ketertiban wilayah
- c) Menfasilitasi desa dalam peningkatan dan pemberdayaan aparatur dan lembaga-lembaga desa, PKK, BPD, LKMD
- d) Menfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap pemerintahan dan perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa dengan ADD dan Dana Desa
- e) Melaksanakan koordinasi dengan pihak ketiga dalam pemberdayaan desa
- f) Menfasilitasi lembaga dan panitia dalam penyaluran hak-hak politik rakyat
- g) Menfasilitasi desa dalam menyelesaikan sengketa desa
- h) Melaksanakan pemberian informasi
- i) Melaksanakan verifikasi dan melakukan rekomendasi untuk pemberian izin-izin

2.1.4. Kelompok Sasaran

Kecamatan Bonatua Lunasi merupakan salah satu kecamatan yang terletak di sisi sebelah utara Kabupaten Toba Samosir yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Simalungun, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lumban Julu. Sementara itu di sebelah Timur dan Selatan juga berbatasan dengan Kecamatan Porsea dan Parmaksian.

Kecamatan Bonatua Lunasi memiliki luas wilayah 57, 74 km² atau 2, 86% dari total luas Kabupaten Toba Samosir. Berada pada 2 29,- 2 39' Lintang Utara dan 98 02'-99 15 Bujur Timur berada di



atas sekitar 939 hingga 1.000 meter dari permukaan laut. Kecamatan Bonatua Lunasi terdiri dari 12 Desa yang terbagi habis dalam 32 dusun. Jumlah Penduduk Kecamatan Bonatua Lunasi Tahun 2024 sekitar 6.288 Jiwa. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bonatua Lunasi, maka kelompok sasaran layanan Kecamatan Bonatua Lunasi antara lain sebagai berikut:

- Pemerintah Desa;
- Masyarakat;
- Organisasi Perangkat Daerah

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Bonatua Lunasi juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di Tingkat Kecamatan

2.1.5. Keuangan dan Neraca Perangkat Daerah

Realisasi Keuangan dan Neraca Daerah Kecamatan Bonatua Lunasi untuk Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8

Realisasi Keuangan Kecamatan Bonatua Lunasi Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-	-
	B. Pendapatan Transfer	-	-	-	-	-
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	-	-
2	BELANJA					
	A. Belanja Operasi	1,485,027,169	1,424,533,454	1,588,388,309	1,771,296,960	1,850,249,721
	B. Belanja Modal	-	71,885,000	60,953,500	37,240,500	4,329,000
	C. Belanja Tak Terduga	-	-	-	-	-
	D. Belanja Transfer					
	Jumlah Belanja	1,485,027,169	1,496,418,454	1,649,341,809	1,808,537,460	1,854,578,721
	Surplus/Defisit	(1,485,027,169)	(1,496,418,454)	(1,649,341,809)	(1,808,537,460)	(1,854,578,721)
3	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-
	B. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	-	-	-	-	-

Tabel 2.9

Neraca Kecamatan Bonatua Lunasi Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET					
	A. Aset Lancar	-	-	-	-	-
	B. Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	C. Aset Tetap	284,706,413	632,811,838	650,165,326	641,917,987	598,908,989
	D. Aset Lainnya	110,169,500	110,169,500	198,814,850	198,814,850	198,814,850
	Jumlah Aset	394,875,913	742,981,338	848,980,176	840,732,837	797,723,839
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-	-	-
	B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	Jumlah Kewajiban	-	-	-	-	-
3	EKUITAS					
	A. Ekuitas	394,875,843	742,981,338	848,980,176	840,197,537	797,188,539
	JUMLAH EKUITAS	394,875,843	742,981,338	848,980,176	840,197,537	797,188,539
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	394,875,843	742,981,338	848,980,176	840,197,537	797,188,539

2.1.6. Aset Perangkat Daerah

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan telah dilengkapi dengan gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak serta moda transportasi), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun masih dirasakan kurang memadai, mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama moda alat transportasi dan perangkat komputer. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 2.10
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat
Daerah Tahun 2024

No	Jenis Barang Inventaris	Merk	Jumlah	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	1	Baik
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	2	Baik
3	Kendaraan Dinas Bermotor lainnya (dst)	Toyota/Rush/	1	Baik
4	Sepeda Motor	Yamaha/Jupiter	1	Baik
5	Sepeda Motor	Suzuki/Thunder/	1	Rusak Berat
6	Sepeda Motor	Yamaha	1	Rusak Berat
7	Penyemprot Tangan(Hand Sprayer)	-	2	Baik
8	Mesin Ketik Manual Standar (14-16 inc)	Ta.Ofistar/	1	Baik
9	Lemari Besi/ Metal	Modera	5	Baik
10	Lemari kayu	Aura	2	Kurang Baik
11	Rak kayu	Triplek 4mm	1	Kurang Baik
12	Filing Cabinet besi	Yanura	1	Kurang Baik
13	Filing Cabinet besi	Yunika	2	Baik
14	Lemari Kaca	Jiahonjiaju	1	Kurang Baik
15	Lemari Kaca	-/2 Pintu	1	Kurang Baik
16	Mesin Absensi	TIMETRONIC	1	Kurang Baik
17	Papan Nama Instansi	Tempahan	1	Baik
18	Papan Pengumuman	Tempahan	1	Baik
19	Alat Kantor Lainnya	Tempahan	1	Baik
20	Alat Kantor Lainnya	Tempahan	1	Baik
21	Alat Kantor Lainnya	Toshiba	1	Baik
22	Meja Kayu	Minimalis 1 laci	1	Baik
23	Kursi Besi/Metal	-	10	Baik
24	Meja Rapat	Aura	1	Baik
25	Meja ½ Biro	Aura	10	Kurang Baik
26	Meja ½ Biro	Aura	1	Baik
27	Meja ½ Biro	½ Biro	10	Baik



28	Kursi Fiber Glas/Plastik	Kiramas	12 buah	Baik
29	Kursi Fiber Glas/Plastik	-/-	19	Baik
30	Kursi Fiber Glas/Plastik	-/-	1	Baik
31	Kursi Fiber Glas/Plastik	Panen	79	Baik
32	Kursi Tamu	-	1	Baik
33	Kursi Putar	Belgio	1	Baik
34	Kursi Putar	PA 662 HD	1	Baik
35	Kursi Lipat	Chitose	1	Baik
36	Meja Komputer	0	4	Baik
37	Partisi	Tempahan	1	Baik
38	Sofa	-	1	Baik
39	Meubeleur lainnya	0	1	Baik
40	Mesin Potong Rumput	-/-	2	Baik
41	Alat PembersihLainnya	-/-	6	Baik
42	Kompor Gas (alat dapur)	-	1	Baik
43	Rice Cooker (alat dapur)	Miyako	1	Baik
44	Rak piring Alumunium	-	1	Baik
45	Camera Film	Elektronik	1	Baik
46	Tiang Bendera	Tempahan	1	Kurang Baik
47	Dispenser	-	1	Baik
48	Gordyin/Kray	-	1	Baik
49	Gordyin/Kray	Kain Kastel	1	Baik
50	Genset	Yamamoto4900	1	Baik
51	P.C.Unit	Acer	1	Baik
52	P.C.Unit	Asus/W 15-065N	1	Baik
53	Lap Top	Intel Core 15	1	Baik
54	Lap Top	Acer	1	Baik
55	Lap Top	Asus	3	Baik
56	Lap Top	Acer	1	Baik
57	Note Book	Axio	1	Baik
58	Printer(Peralatan Personal Komputer)	Canon /IP	1	Baik
59	Printer(Peralatan Personal Komputer)	Canon	1	Baik
60	Printer(Peralatan Personal Komputer)	Canon Pixma	2	Baik
62	Printer(Peralatan Personal Komputer)	Canon Pixma	2	Baik

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BONATUA LUNASI

A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Kecamatan Bonatua Lunasi diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan Misi Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Toba 2025-2029, maka permasalahan yang dihadapi Kecamatan Bonatua Lunasi antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.11
Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan kurang maksimal	Keterbatasan Petugas SDM
		Penyelesaian penyusunan APB-Des tidak tepat waktu	Keterbatasan SDM Perangkat Desa
		Penyelesaian penyusunan RKP-Des tidak tepat waktu	Keterbatasan SDM Perangkat Desa
		Terlambatnya laporan kejadian gangguan kantibnam dan bencana alam	Terlambatnya Laporan dari Desa
			Keterbatasan Petugas SDM
		Masih terdapat Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa	Kurangnya Kesadaran Perangkat Desa Akan Disiplin Waktu
		Masih terdapat Pelanggaran aturan dan Peraturan Kepala Daerah	Kurangnya Pemahaman SDM dalam menerapkan aturan yang ada Kurang Optimalnya Pendampingan Terhadap Masyarakat

B. Isu Strategis

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 2.11 tersebut maka isu strategis Kecamatan Bonatua Lunasi dalam periode 2025-2029 adalah masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Permasalahan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan isu strategis yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut

1. Peningkatan keterampilan terhadap penguasaan teknologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya alat moda transportasi dan perangkat komputer sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan.
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan kepentingan masyarakat.
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan
5. Pengembangan dalam meningkatkan pengetahuan dari aparatur yang ada di kantor Camat Bonatua Lunasui guna dapat menyikapi perkembangan dunia saat ini dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis (Renstra) Kecamatan Bonatua Lunasi

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Maka dalam Perumusan Tujuan Renstra Kecamatan akan diselaraskan dengan misi, tujuan/sasaran daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Pada Tabel 3.1. dapat dilihat Misi, tujuan/sasaran daerah dalam RPJMD Kabupaten 2025-2029 relevan dalam perumusan Tujuan sasaran renstra Kecamatan

TABEL 3.1.		
TUJUAN DAN SASARAN MISI 4 RPJMD KABUPATEN TOBA		
Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Sebagai Pelayan (Parhobas) Rakyat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah



"Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 adalah” Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Dan yang menjadi indikator tujuan Renstra Kecamatan Bonatua Lunasi adalah ”Indeks Kepuasan Masyarakat” dengan target yang telah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Toba.

Untuk mengoptimalkan pencapaian dan tujuan sebagaimana dimaksud di atas maka sasaran yang harus dicapai dirumuskan sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Kewenangan yang Dilimpahkan KDH
- 2 Meningkatkan Pembinaan Pemerintah Desa
- 3 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat
- 4 Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada Tabel 3.2 Dapat dilihat Tujuan,sasaran dan indikator renstra kecamatan Bonatua Lunasi"

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bonatua Lunasi 2025-2025
Pemerintah Kabupaten Tobba

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Bonatua Lunasi											
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	-	-	76,60	78,84	81,13	83,49	88,40	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kewenangan Yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	0	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Pembinaan Pemerintahan Desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	65,5	70,50	72,50	74,50	76,50	78,50	80,50	

3.2 STRATEGI RENSTRA KECAMATAN BONATUA LUNASI

Pencapaian tujuan dan sasaran renstra membutuhkan adanya strategi yang akan mengarahkan terlaksananya tujuan dan sasaran dimaksud. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran renstra merupakan upaya-upaya yang menjadi arahan utama pelaksanaan program, yaitu:

1. Penentuan tahapan pelaksanaan renstra untuk mewujudkan capaian tujuan;
2. Penentuan program prioritas untuk mewujudkan optimalisasi anggaran dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran

TABEL 3.3
PENAHAAPAN RENSTRA KECAMATAN BONATUA LUNASI

	TAHAP I 2026	TAHAP I 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
RPJMD	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik;	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan publik;	Pemantapan kualitas pelayanan publik;	Perwujudan Toba Mantap sebagai landasan menuju Toba Unggul, Maju dan Berkelanjutan
Renstra Kecamatan	Penyiapan landasan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas untuk mendukung Toba Mantap	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung Toba Mantap

3.3 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN BONATUA LUNASI

Pencapaian tujuan renstra kecamatan dilaksanakan melalui 4 sasaran yang diwujudkan dalam program prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mencapai target sasaran renstra.

Sasaran yang dimaksud dalam pencapaian target tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kewenangan Yang dilimpahkan KDH.



2. Meningkatnya Pembinaan Pemerintahan Desa.
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
4. Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

TABEL 3.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN BONATUA LUNASI 2025-2029

VISI : "TOBA MANTAP 2029 : Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya."				
MISI NO 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Sebagai Pelayan (Parhobas) Rakyat.				
NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kewenangan yang Dilimpahkan KDH	Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan	1. Penyediaan SOP pelaksanaan kewenangan
		Meningkatnya pembinaan pemerintah desa	Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dan desa/kelurahan 2. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 3. Meningkatkan pengawasan kegiatan yang dilakukan desa
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan umum	1. Melibatkan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum 2. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana umum dengan melibatkan masyarakat
		Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Peningkatan kinerja dengan beorientasi pada pelayanan	1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 2. Penyusunan SOP sebagai standar pelayanan 3. Meyediakan saluran pengaduan masyarakat



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program

Program merupakan program yang akan dilaksanakan dalam pencapaian tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan mengacu pada nomenklatur program yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Program ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

**TABEL 4.1 PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA KECAMATAN BONATUA LUNASI
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Bonatua Lunasi							
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kewenangan Yang dilimpahkan KDH	Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH		Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		
					Kesesuaian layanan dengan SOP (%)		
					Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Meningkatnya ketersediaan SOP pelayanan publik	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BONATUA LUNASI
KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya Pembinaan Pemerintahan Desa			Tingkat Pembinaan Desa (%)		
			Meningkatnya pembinaan desa		Tingkat Pembinaan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat			Tingkat Pemberdayaan Lembaga		
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat		Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
		Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah			Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)		
			Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BONATUA LUNASI
KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya administrasi kepegawaian Perangkat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan bagian program yang akan dilaksanakan dalam pencapaian tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan mengacu pada nomenklatur program yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kegiatan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				2.186.150.000,00		2.403.293.000,00		2.394.894.000,00		2.461.961.000,00		2.582.343.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.036.950.000,00		2.176.114.000,00		2.167.894.000,00		2.201.961.000,00		2.289.343.000,00		
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	65,5	72,50	2.036.950.000,00	74,50	2.176.114.000,00	76,50	2.167.894.000,00	78,50	2.201.961.000,00	80,50	2.289.343.000,00	7.01.0.00.0.00.16.0 000 - Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00		20.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		25.000.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	4	5.000.000,00	4	20.000.000,00	4	16.000.000,00	4	17.000.000,00	4	25.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	22		22		23		22		22			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.500.000,00		10.000.000,00		8.000.000,00		8.500.000,00		12.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	4	2.500.000,00	4	10.000.000,00	4	8.000.000,00	4	8.500.000,00	4	12.500.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.500.000,00		10.000.000,00		8.000.000,00		8.500.000,00		12.500.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	22	2.500.000,00	22	10.000.000,00	23	8.000.000,00	22	8.500.000,00	22	12.500.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.844.523.000,00		1.867.114.000,00		1.890.157.000,00		1.913.661.000,00		1.937.635.000,00		
Meningkatnya Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	18	1.844.523.000,00	18	1.867.114.000,00	18	1.890.157.000,00	18	1.913.661.000,00	18	1.937.635.000,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.844.523.000,00		1.867.114.000,00		1.890.157.000,00		1.913.661.000,00		1.937.635.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	18	1.844.523.000,00	18	1.867.114.000,00	18	1.890.157.000,00	18	1.913.661.000,00	18	1.937.635.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		20.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0,00	10	20.000.000,00	10	16.000.000,00	10	17.000.000,00	10	30.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		0		0		0		18			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		0,00		0,00		20.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-		20.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	-	10	20.000.000,00	10	16.000.000,00	10	17.000.000,00	10	10.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				56.507.000,00		95.000.000,00		95.737.000,00		98.300.000,00		110.000.000,00		
Meningkatnya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	4	56.507.000,00	4	95.000.000,00	4	95.737.000,00	4	98.300.000,00	4	110.000.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	1		1		1		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000,00		4.000.000,00		4.200.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.200.000,00	2	4.500.000,00	2	5.000.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000,00		15.500.000,00		15.600.000,00		15.800.000,00		17.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	15.000.000,00	4	15.500.000,00	4	15.600.000,00	4	15.800.000,00	4	17.000.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000,00		6.500.000,00		6.600.000,00		6.800.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	3.000.000,00	2	6.500.000,00	2	6.600.000,00	2	6.800.000,00	2	8.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.000.000,00		6.500.000,00		6.600.000,00		6.800.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	3.000.000,00	4	6.500.000,00	4	6.600.000,00	4	6.800.000,00	4	8.000.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				7.507.000,00		12.500.000,00		12.600.000,00		12.800.000,00		16.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	4	7.507.000,00	4	12.500.000,00	4	12.600.000,00	4	12.800.000,00	4	16.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000,00		50.000.000,00		50.137.000,00		51.600.000,00		56.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	25.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.137.000,00	2	51.600.000,00	2	56.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.000.000,00		45.000.000,00		20.000.000,00		23.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	6.000.000,00	1	45.000.000,00	1	20.000.000,00	1	23.000.000,00	1	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0		2		2		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0		0		0		1					
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	1		2		1		2		1			
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		-		-		-		35.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	35.000.000,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	-	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.000.000,00		25.000.000,00		5.000.000,00		8.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	1	6.000.000,00	2	25.000.000,00	1	5.000.000,00	2	8.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	-	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				59.920.000,00		61.000.000,00		61.000.000,00		62.000.000,00		64.068.000,00		
Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	59.920.000,00	1	61.000.000,00	1	61.000.000,00	1	62.000.000,00	1	64.068.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				13.000.000,00		13.026.000,00		13.052.000,00		13.078.000,00		13.104.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	13.000.000,00	1	13.026.000,00	1	13.052.000,00	1	13.078.000,00	1	13.104.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				46.920.000,00		47.974.000,00		47.948.000,00		48.922.000,00		50.964.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	46.920.000,00	4	47.974.000,00	4	47.948.000,00	4	48.922.000,00	4	50.964.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				65.000.000,00		68.000.000,00		69.000.000,00		71.000.000,00		72.640.000,00		
Terpeliharanya BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	65.000.000,00	2	68.000.000,00	2	69.000.000,00	2	71.000.000,00	2	72.640.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	3		3		3							
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	16		16		16		16		16			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				52.627.000,00		53.153.000,00		53.685.000,00		54.222.000,00		54.764.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	3	52.627.000,00	3	53.153.000,00	3	53.685.000,00	3	54.222.000,00	3	54.764.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.000.000,00		7.847.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		9.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	16	6.000.000,00	16	7.847.000,00	16	8.000.000,00	16	9.000.000,00	16	9.500.000,00		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.373.000,00		7.000.000,00		7.315.000,00		7.778.000,00		8.376.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	6.373.000,00	2	7.000.000,00	2	7.315.000,00	2	7.778.000,00	2	8.376.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				26.000.000,00		72.000.000,00		62.000.000,00		70.000.000,00		81.000.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP	0	100	26.000.000,00	100	72.000.000,00	100	62.000.000,00	100	70.000.000,00	100	81.000.000,00	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20.000.000,00		60.000.000,00		50.000.000,00		56.000.000,00		65.000.000,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	2	20.000.000,00	4	60.000.000,00	4	50.000.000,00	4	56.000.000,00	4	65.000.000,00		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				20.000.000,00		60.000.000,00		50.000.000,00		56.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	2	20.000.000,00	4	60.000.000,00	4	50.000.000,00	4	56.000.000,00	4	65.000.000,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		
Meningkatnya ketersediaan SOP pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	0	6	6.000.000,00	6	12.000.000,00	6	12.000.000,00	6	14.000.000,00	6	16.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0	2		2		2		2		2			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				3.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0	2	3.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	7.000.000,00	2	8.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				3.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	0	6	3.000.000,00	6	6.000.000,00	6	6.000.000,00	6	7.000.000,00	6	8.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				21.000.000,00		52.000.000,00		49.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	0	100	21.000.000,00	100	52.000.000,00	100	49.000.000,00	100	60.000.000,00	100	70.000.000,00	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				18.000.000,00		41.000.000,00		38.000.000,00		48.000.000,00		57.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	2	18.000.000,00	2	41.000.000,00	2	38.000.000,00	2	48.000.000,00	2	57.000.000,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	5		5		5		5		5			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	5	3.000.000,00	5	16.000.000,00	5	16.000.000,00	5	25.000.000,00	5	30.000.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15.000.000,00		25.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		27.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	2	15.000.000,00	2	25.000.000,00	2	22.000.000,00	2	23.000.000,00	2	27.000.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0	5	3.000.000,00	5	11.000.000,00	5	11.000.000,00	5	12.000.000,00	5	13.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0	5	3.000.000,00	5	11.000.000,00	5	11.000.000,00	5	12.000.000,00	5	13.000.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan	0	100	3.000.000,00	100	10.000.000,00	100	20.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	1	3.000.000,00	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	1	3.000.000,00	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				89.200.000,00		77.179.000,00		79.000.000,00		83.000.000,00		87.000.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	100	89.200.000,00	100	77.179.000,00	100	79.000.000,00	100	83.000.000,00	100	87.000.000,00	7.01.0.00.0.00.16.000 - Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				89.200.000,00		77.179.000,00		79.000.000,00		83.000.000,00		87.000.000,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1	89.200.000,00	1	77.179.000,00	1	79.000.000,00	1	83.000.000,00	1	87.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	400		400		400		400		400			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	200		200		200		200		200			
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50.000.000,00		35.000.000,00		36.000.000,00		37.000.000,00		38.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	400	50.000.000,00	400	35.000.000,00	400	36.000.000,00	400	37.000.000,00	400	38.000.000,00		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				20.000.000,00		22.179.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	200	20.000.000,00	200	22.179.000,00	200	23.000.000,00	200	25.000.000,00	200	27.000.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				19.200.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1	19.200.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00	1	22.000.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				10.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		25.000.000,00		
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa	0	100	10.000.000,00	100	16.000.000,00	100	17.000.000,00	100	17.000.000,00	100	25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				10.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		25.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1	1	10.000.000,00	1	16.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	25.000.000,00		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				10.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1	1	10.000.000,00	1	16.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	25.000.000,00		

4.3 Daftar Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, Kecamatan Bonatua Lunasi menyusun program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan pohon kinerja kecamatan yang ditampilkan dalam Tabel 4.3 sebagai berikut:

TABEL 4.3 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN BONATUA LUNASI PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Bonatua Lunasi				
1	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pencapaian tujuan dan sasaran renstra membutuhkan adanya indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud merupakan indikator kinerja utama dan juga indikator kinerja kunci, yang ditampilkan dalam Tabel 4.4 dan 4.5 sebagai berikut :



Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Renstra Kecamatan Bonatua Lunasi
Pemerintah Kabupaten Toba

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Bonatua Lunasi								
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	76,60	78,84	81,13	83,49	88,40
3	Kesesuaian layanan dengan SOP	%	0	0	100	100	100	100	100
4	Tingkat Pembinaan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Angka	65,5	70,50	72,50	74,50	76,50	78,50	80,50

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci
Renstra Kecamatan Bonatua Lunasi
Pemerintah Kabupaten Toba

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	NIHIL									



BAB V PENUTUP

Renstra Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD. Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renstra Kecamatan Bonatua Lunasi Tahun 2025-2029 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/ kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

Untuk mencapai keberhasilan dan menjaga kesinambungan pembangunan pada Tahun Anggaran 2025-2029, maka RENSTRA Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 ini dapat disajikan sebagai pedoman perencanaan, penyusunan, pengendalian dan pengawasan anggaran serta yang pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja tahunan dan lima tahunan yang terwujud dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bonatua Lunasi, sehingga diharapkan dapat dicapai hasil yang lebih optimal untuk kegiatan tahunan serta lima tahunan yang akan datang yang tentunya tetap menyesuaikan dengan kondisi mendatang.

Harapan kami Renstra Kecamatan Bonatua Lunasi ini bermanfaat bagi Pemerintah Kecamatan Bonatua Lunasi khususnya dalam upaya pelayanan kepada masyarakat yang bermuara pada upaya-upaya Peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Toba. sesuai Visi Misi Kabupaten Toba **Mantap 2029, Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya.**



Lumban Lobu, 19 September 2025

Camat Bonatua Lunasi



Judiman Silitonga, SE

Pembina/IVa

NIP. 196809291988031001

LAMPIRAN

TABEL 3.2 TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN BONATUA LUNASI 2025-2029
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Bonatua Lunasi											
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	-	-	76,60	78,84	81,13	83,49	88,40	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kewenangan Yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	0	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Pembinaan Pemerintahan Desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	65,5	70,50	72,50	74,50	76,50	78,50	80,50	

TABEL 4.1 PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA KECAMATAN BONATUA LUNASI
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Bonatua Lunasi							
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kewenangan Yang			Kesesuaian layanan dengan SOP (%)		
		Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan		Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Meningkatnya ketersediaan SOP pelayanan publik	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan			Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya Pembinaan	Meningkatnya pembinaan desa	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)		
					Tingkat Pembinaan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Meningkatnya Pemberdayaan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
					Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)		
					Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
		Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi			Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)		
			Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi		Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya administrasi kepegawaian Perangkat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				2.186.150.000,00		2.403.293.000,00		2.394.894.000,00		2.461.961.000,00		2.582.343.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.036.950.000,00		2.176.114.000,00		2.167.894.000,00		2.201.961.000,00		2.289.343.000,00		
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	65,5	72,50	2.036.950.000,00	74,50	2.176.114.000,00	76,50	2.167.894.000,00	78,50	2.201.961.000,00	80,50	2.289.343.000,00	7.01.0.00.0.00.16.0 000 - Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00		20.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		25.000.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	4	5.000.000,00	4	20.000.000,00	4	16.000.000,00	4	17.000.000,00	4	25.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	22		22		23		22		22			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.500.000,00		10.000.000,00		8.000.000,00		8.500.000,00		12.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	4	2.500.000,00	4	10.000.000,00	4	8.000.000,00	4	8.500.000,00	4	12.500.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.500.000,00		10.000.000,00		8.000.000,00		8.500.000,00		12.500.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	22	2.500.000,00	22	10.000.000,00	23	8.000.000,00	22	8.500.000,00	22	12.500.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.844.523.000,00		1.867.114.000,00		1.890.157.000,00		1.913.661.000,00		1.937.635.000,00		
Meningkatnya Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	18	1.844.523.000,00	18	1.867.114.000,00	18	1.890.157.000,00	18	1.913.661.000,00	18	1.937.635.000,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.844.523.000,00		1.867.114.000,00		1.890.157.000,00		1.913.661.000,00		1.937.635.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	18	1.844.523.000,00	18	1.867.114.000,00	18	1.890.157.000,00	18	1.913.661.000,00	18	1.937.635.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		20.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0,00	10	20.000.000,00	10	16.000.000,00	10	17.000.000,00	10	30.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		0		0		0		18			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		0,00		0,00		20.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-		20.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	-	10	20.000.000,00	10	16.000.000,00	10	17.000.000,00	10	10.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				56.507.000,00		95.000.000,00		95.737.000,00		98.300.000,00		110.000.000,00		
Meningkatnya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	4	56.507.000,00	4	95.000.000,00	4	95.737.000,00	4	98.300.000,00	4	110.000.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	1		1		1		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000,00		4.000.000,00		4.200.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.200.000,00	2	4.500.000,00	2	5.000.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000,00		15.500.000,00		15.600.000,00		15.800.000,00		17.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	15.000.000,00	4	15.500.000,00	4	15.600.000,00	4	15.800.000,00	4	17.000.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000,00		6.500.000,00		6.600.000,00		6.800.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	3.000.000,00	2	6.500.000,00	2	6.600.000,00	2	6.800.000,00	2	8.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.000.000,00		6.500.000,00		6.600.000,00		6.800.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	3.000.000,00	4	6.500.000,00	4	6.600.000,00	4	6.800.000,00	4	8.000.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				7.507.000,00		12.500.000,00		12.600.000,00		12.800.000,00		16.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	4	7.507.000,00	4	12.500.000,00	4	12.600.000,00	4	12.800.000,00	4	16.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000,00		50.000.000,00		50.137.000,00		51.600.000,00		56.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	25.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.137.000,00	2	51.600.000,00	2	56.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.000.000,00		45.000.000,00		20.000.000,00		23.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	6.000.000,00	1	45.000.000,00	1	20.000.000,00	1	23.000.000,00	1	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0		2		2		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0		0		0		1					
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	1		2		1		2		1			
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		-		-		-		35.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	35.000.000,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	-	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.000.000,00		25.000.000,00		5.000.000,00		8.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	1	6.000.000,00	2	25.000.000,00	1	5.000.000,00	2	8.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	-	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				59.920.000,00		61.000.000,00		61.000.000,00		62.000.000,00		64.068.000,00		
Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	59.920.000,00	1	61.000.000,00	1	61.000.000,00	1	62.000.000,00	1	64.068.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				13.000.000,00		13.026.000,00		13.052.000,00		13.078.000,00		13.104.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	13.000.000,00	1	13.026.000,00	1	13.052.000,00	1	13.078.000,00	1	13.104.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				46.920.000,00		47.974.000,00		47.948.000,00		48.922.000,00		50.964.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	46.920.000,00	4	47.974.000,00	4	47.948.000,00	4	48.922.000,00	4	50.964.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				65.000.000,00		68.000.000,00		69.000.000,00		71.000.000,00		72.640.000,00		
Terpeliharanya BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	65.000.000,00	2	68.000.000,00	2	69.000.000,00	2	71.000.000,00	2	72.640.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	3		3		3							
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	16		16		16		16		16			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				52.627.000,00		53.153.000,00		53.685.000,00		54.222.000,00		54.764.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	3	52.627.000,00	3	53.153.000,00	3	53.685.000,00	3	54.222.000,00	3	54.764.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.000.000,00		7.847.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		9.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	16	6.000.000,00	16	7.847.000,00	16	8.000.000,00	16	9.000.000,00	16	9.500.000,00		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.373.000,00		7.000.000,00		7.315.000,00		7.778.000,00		8.376.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	6.373.000,00	2	7.000.000,00	2	7.315.000,00	2	7.778.000,00	2	8.376.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				26.000.000,00		72.000.000,00		62.000.000,00		70.000.000,00		81.000.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP	0	100	26.000.000,00	100	72.000.000,00	100	62.000.000,00	100	70.000.000,00	100	81.000.000,00	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20.000.000,00		60.000.000,00		50.000.000,00		56.000.000,00		65.000.000,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	2	20.000.000,00	4	60.000.000,00	4	50.000.000,00	4	56.000.000,00	4	65.000.000,00		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				20.000.000,00		60.000.000,00		50.000.000,00		56.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	2	20.000.000,00	4	60.000.000,00	4	50.000.000,00	4	56.000.000,00	4	65.000.000,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		
Meningkatnya ketersediaan SOP pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	0	6	6.000.000,00	6	12.000.000,00	6	12.000.000,00	6	14.000.000,00	6	16.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0	2		2		2		2		2			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				3.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0	2	3.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	7.000.000,00	2	8.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				3.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	0	6	3.000.000,00	6	6.000.000,00	6	6.000.000,00	6	7.000.000,00	6	8.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				21.000.000,00		52.000.000,00		49.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	0	100	21.000.000,00	100	52.000.000,00	100	49.000.000,00	100	60.000.000,00	100	70.000.000,00	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				18.000.000,00		41.000.000,00		38.000.000,00		48.000.000,00		57.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	2	18.000.000,00	2	41.000.000,00	2	38.000.000,00	2	48.000.000,00	2	57.000.000,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	5		5		5		5		5			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	5	3.000.000,00	5	16.000.000,00	5	16.000.000,00	5	25.000.000,00	5	30.000.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15.000.000,00		25.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		27.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	2	15.000.000,00	2	25.000.000,00	2	22.000.000,00	2	23.000.000,00	2	27.000.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0	5	3.000.000,00	5	11.000.000,00	5	11.000.000,00	5	12.000.000,00	5	13.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0	5	3.000.000,00	5	11.000.000,00	5	11.000.000,00	5	12.000.000,00	5	13.000.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan	0	100	3.000.000,00	100	10.000.000,00	100	20.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	1	3.000.000,00	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	1	3.000.000,00	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				89.200.000,00		77.179.000,00		79.000.000,00		83.000.000,00		87.000.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	100	89.200.000,00	100	77.179.000,00	100	79.000.000,00	100	83.000.000,00	100	87.000.000,00	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				89.200.000,00		77.179.000,00		79.000.000,00		83.000.000,00		87.000.000,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1	89.200.000,00	1	77.179.000,00	1	79.000.000,00	1	83.000.000,00	1	87.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	400		400		400		400		400			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	200		200		200		200		200			
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50.000.000,00		35.000.000,00		36.000.000,00		37.000.000,00		38.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	400	50.000.000,00	400	35.000.000,00	400	36.000.000,00	400	37.000.000,00	400	38.000.000,00		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				20.000.000,00		22.179.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	200	20.000.000,00	200	22.179.000,00	200	23.000.000,00	200	25.000.000,00	200	27.000.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				19.200.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1	19.200.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00	1	22.000.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				10.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		25.000.000,00		
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa	0	100	10.000.000,00	100	16.000.000,00	100	17.000.000,00	100	17.000.000,00	100	25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				10.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		25.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1	1	10.000.000,00	1	16.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	25.000.000,00		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				10.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1	1	10.000.000,00	1	16.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	25.000.000,00		

**TABEL 4.3 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN BONATUA LUNASI
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Bonatua Lunasi				
1	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama
Renstra Kecamatan Bonatua Lunasi
Pemerintah Kabupaten Toba

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Bonatua Lunasi								
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	76,60	78,84	81,13	83,49	88,40
3	Kesesuaian layanan dengan SOP	%	0	0	100	100	100	100	100
4	Tingkat Pembinaan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Angka	65,5	70,50	72,50	74,50	76,50	78,50	80,50

Metadata Indikator Kecamatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)		
Penggunaan Indikator	Tujuan Renstra		
Definisi	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang menggambarkan kualitas pelayanan publik yang disediakan suatu unit pelayanan publik. Nilai Kinerja Pelayanan Publik diperoleh berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		
Rumus Perhitungan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat		
Interpretasi	Indeks Kepuasan Masyarakat dibagi dalam 4 kategori berikut:		
	Nilai Interval Konversi	Kinerja Pelayanan	Predikat Kinerja Unit Pelayanan
	88,31-100	A	Sangat Baik
	76,61-88,30	B	Baik
	65,00-76,60	C	Kurang Baik
	25,00-64,99	D	Tidak Baik
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik		
Frekuensi	Tahunan		

2. Nilai Evaluasi Internal AKIP (angka)

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Internal AKIP (angka)		
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra		
	X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota; Kinerja Program: Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		

Definisi	Evaluasi Internal AKIP merupakan hasil penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh APIP kabupaten		
Rumus Perhitungan	Hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja oleh APIP		
Interpretasi	Nilai AKIP dibagi dalam 7 kategori sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu:		
	Nilai	Predikat	Interpretasi
	Nilai > 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
	Nilai > 80 – 90	A	Memuaskan
	Nilai > 70 – 80	BB	Sangat Baik
	Nilai > 60 – 70	B	Baik
	Nilai > 50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
	Nilai > 40 – 50	C	Kurang
	Nilai > 30 – 40	D	Sangat Kurang
Sumber Data	Inspektorat Daerah		
Frekuensi	Tahunan		

3. Kesesuaian Layanan dengan SOP (persen)

Nama Indikator	Kesesuaian Layanan dengan SOP (persen)
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra; 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Definisi	Kesesuaian Layanan dengan SOP menggambarkan ukuran kualitas pelayanan publik yang dilakukan suatu unit pelayanan. Nilai

	indikator diukur dengan membandingkan jumlah seluruh layanan yang dilakukan yang sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP terhadap seluruh layanan yang diajukan oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$= \frac{Layanan_{sesuai\ SOP}}{Layanan_{total}} \times 100$ Keterangan: Layanan_{sesuai SOP} = Jumlah seluruh layanan perizinan dan non perizinan yang diberikan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan waktu sesuai SOP dalam suatu periode waktu tertentu Layanan_{total} = Jumlah seluruh layanan perizinan dan non perizinan yang diajukan masyarakat dalam suatu periode waktu tertentu
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah
Sumber Data	Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan
Frekuensi	Triwulanan

4. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)

Nama Indikator	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kinerja Program: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
Definisi	Indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan menggambarkan kinerja camat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dalam satu periode tertentu. Pemberdayaan dilakukan melalui upaya-upaya (1) peningkatan pemahaman lembaga kemasyarakatan atas peran dan fungsinya; dan (2) fasilitasi pelaksanaan tugas lembaga

	kemasyarakatan
Rumus Perhitungan	$= \frac{\frac{LK_{ditingkatkan}}{LK_{total}} + \frac{LK_{difasilitasi}}{LK_{total}}}{2} \times 100$ Keterangan: $LK_{ditingkatkan}$ = Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan pemahaman perannya $LK_{difasilitasi}$ = Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dalam melaksanakan tugasnya LK_{total} = Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di kecamatan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik kinerja camat dalam melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan

5. Tingkat Pembinaan Desa (%)

Nama Indikator	Tingkat Pembinaan Desa (%)
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kinerja Program: Meningkatnya pembinaan desa
Definisi	Tingkat Pembinaan Desa memberikan ukuran kinerja kecamatan dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa di wilayah kecamatan. Pembinaan dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan/pendampingan/fasilitasi dalam hal: (1) penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, (2) pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa, (3) pengelolaan keuangan dan aset desa, (4) pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa, (5) sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, (6) pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan, dan (7) pemberdayaan masyarakat desa.

Rumus Perhitungan	$TPD = \frac{D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5 + D_6 + D_7}{7} \times 100$ Keterangan: TPD = Tingkat Pembinaan Desa D₁ = Pendampingan/fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa D₂ = Pendampingan/fasilitasi pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa D₃ = Pendampingan/fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa D₄ = Pendampingan/fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa D₅ = Pendampingan/fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa D₆ = Pendampingan/fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan D₇ = Pendampingan/fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa Menghitung D₁: $D_1 = \frac{Perdes_{fas}}{Perdes_{total}} + \frac{Perkades_{fas}}{Perkades_{total}}$ Keterangan: Perdes_{fas} = Jumlah Perdes yang difasilitasi penyusunannya Perdes_{total} = Jumlah seluruh Perdes yang disusun seluruh desa di kecamatan Perkades_{fas} = Jumlah Perkades yang difasilitasi penyusunannya Perkades_{total} = Jumlah seluruh Perkades yang disusun seluruh desa di kecamatan Menghitung D₂: $D_2 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan

	Desa _{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₃: $D_3 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan aset desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₄: $D_4 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₅: $D_4 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam hal sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₆: $D_6 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₇: $D_7 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan:

	Desa _{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam hal pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa _{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
Interpretasi	Semakin besar nilai indikator semakin baik pembinaan yang dilaksanakan kecamatan terhadap desa yang berada di wilayahnya
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan

6. Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)

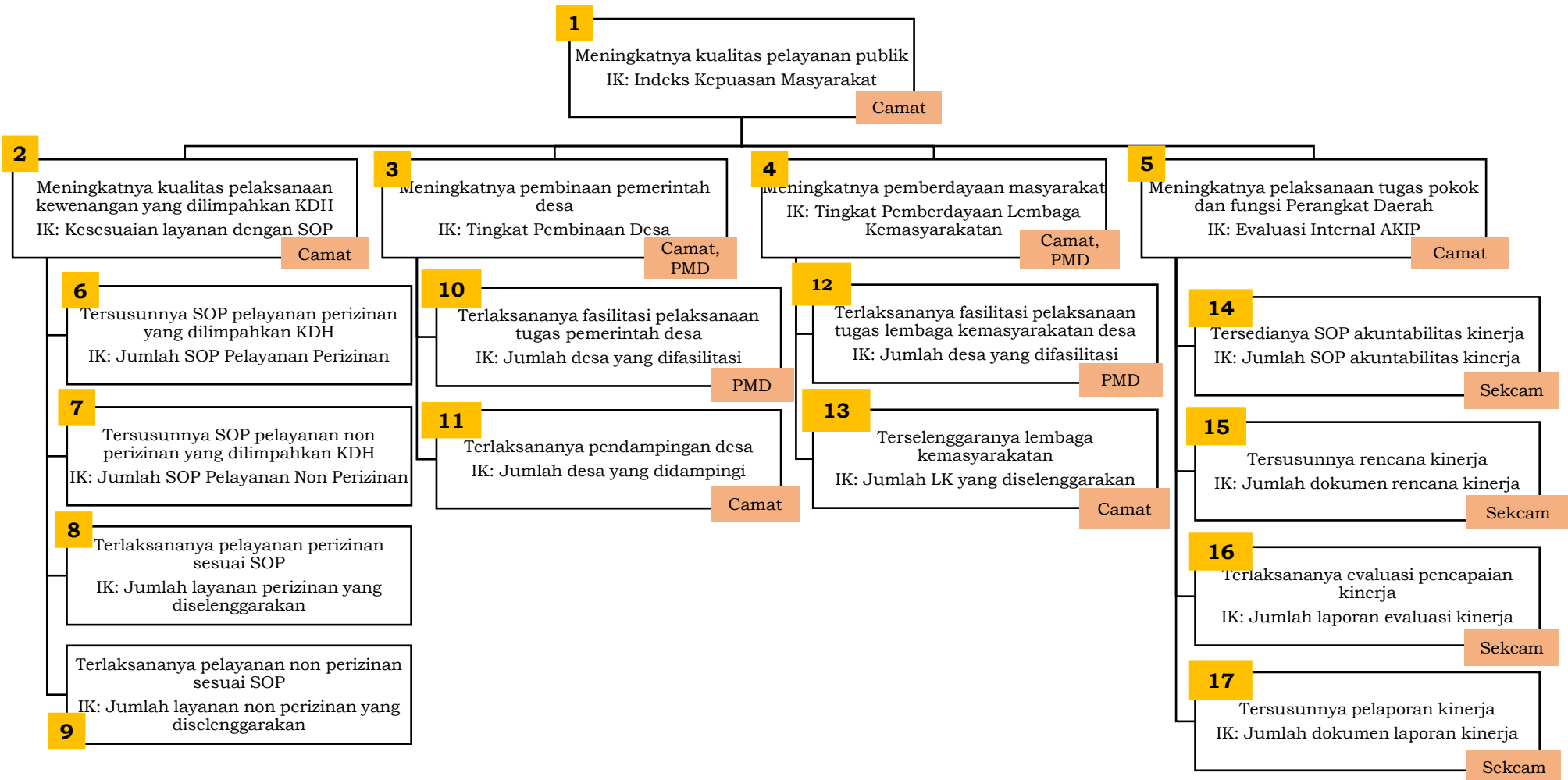
Nama Indikator	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)
Penggunaan Indikator	7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kinerja Program: Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan
Definisi	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum menggambarkan ukuran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Camat sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
Rumus Perhitungan	$= \frac{Kelompok_{dibina}}{Pembinaan_{dilimpahkan}} \times 100$ Keterangan: Kelompok_{dibina} = Jumlah kelompok masyarakat + jumlah organisasi kemasyarakatan + jumlah tokoh pemuda + jumlah tokoh agama yang diberikan pembinaan dalam melaksanakan fungsinya Pembinaan_{dilimpahkan} = Jumlah seluruh kelompok masyarakat + jumlah seluruh organisasi kemasyarakatan + jumlah seluruh tokoh pemuda + jumlah seluruh tokoh agama yang ada di kecamatan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum yang

	dilimpahkan kepada Camat
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan

7. Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)

Nama Indikator	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)
Penggunaan indikator	7.01.04 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kinerja Program: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan
Definisi	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan memberikan ukuran kinerja pemerintah kecamatan dalam menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah gangguan trantibum ditangani}}{\text{Jumlah seluruh gangguan trantibum yang terjadi}} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik upaya penanganan gangguan trantibum di kecamatan
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan

Pohon Kinerja Kecamatan



Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/ 1

1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik IK: Indeks Kepuasan Masyarakat	➔	<table><tr><td>Menjadi:</td><td colspan="6">Tujuan Renstra</td></tr><tr><td rowspan="2">Target</td><td>2024</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>-</td><td>76,60</td><td>78,84</td><td>81,13</td><td>83,49</td><td>88,40</td></tr></table>	Menjadi:	Tujuan Renstra						Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030	-	76,60	78,84	81,13	83,49	88,40
Menjadi:	Tujuan Renstra																						
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030																	
	-	76,60	78,84	81,13	83,49	88,40																	
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH IK: Kesesuaian layanan dengan SOP	➔	<table><tr><td>Menjadi:</td><td colspan="6">Sasaran Renstra; Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</td></tr><tr><td rowspan="2">Target</td><td>2024</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>	Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030	0	100	100	100	100	100
Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik																						
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030																	
	0	100	100	100	100	100																	
3	Meningkatnya pembinaan pemerintah desa IK: Tingkat Pembinaan Desa	➔	<table><tr><td>Menjadi:</td><td colspan="6">Sasaran Renstra; Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</td></tr><tr><td rowspan="2">Target:</td><td>2024</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>	Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030	0	100	100	100	100	100
Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																						
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030																	
	0	100	100	100	100	100																	
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat IK: Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	➔	<table><tr><td>Menjadi:</td><td colspan="6">Sasaran Renstra; Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</td></tr><tr><td rowspan="2">Target:</td><td>2024</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>	Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030	0	100	100	100	100	100
Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan																						
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030																	
	0	100	100	100	100	100																	
5	Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah IK: Evaluasi Internal AKIP	➔	<table><tr><td>Menjadi:</td><td colspan="6">Sasaran Renstra; Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;</td></tr><tr><td rowspan="2">Target:</td><td>2024</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>65,5</td><td>72,50</td><td>74,50</td><td>76,50</td><td>78,50</td><td>80,50</td></tr></table>	Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;						Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030	65,5	72,50	74,50	76,50	78,50	80,50
Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;																						
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030																	
	65,5	72,50	74,50	76,50	78,50	80,50																	

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/2

6 Tersusunnya SOP pelayanan perizinan yang dilimpahkan KDH IK: Jumlah SOP Pelayanan Perizinan tersedia		Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					
		Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan					
Terlaksananya pelayanan perizinan sesuai SOP IK: Jumlah layanan perizinan yang diselenggarakan		Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
			-	4	4	4	4	4
8		Catatan	Target tiap tahun = [3 SOP Perizinan] + [1 Laporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan] Laporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan menjelaskan antara lain Persentase layanan perizinan yang dilaksanakan sesuai SOP					

7 Tersusunnya SOP pelayanan non perizinan yang dilimpahkan KDH IK: Jumlah SOP Pelayanan Non Perizinan tersedia		Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					
		Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan					
Terlaksananya pelayanan non perizinan sesuai SOP IK: Jumlah layanan non perizinan yang diselenggarakan		Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
			-	4	4	4	4	4
9		Catatan	Target tiap tahun = [3 SOP Non Perizinan] + [1 Laporan Pelaksanaan Pelayanan Non Perizinan] Laporan Pelaksanaan Pelayanan Non Perizinan menjelaskan antara lain Persentase layanan non perizinan yang dilaksanakan sesuai SOP					

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/3

10 dan
12



Ke Renstra PMD

11

Terlaksananya pendampingan desa
IK: Jumlah desa yang didampingi



Dilaksanakan dengan:	7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					
Indikator SubKegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	12	12	12	12	12	12

13

Terselenggaranya lembaga kemasyarakatan
IK: Jumlah LK yang diselenggarakan



Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	5	5	5	5	5	5

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/4

